

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Globalisasi yang terjadi saat ini membuat perusahaan bersaing untuk menjadi perusahaan yang terbaik. Hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Perusahaan mempunyai tuntutan untuk meningkatkan performanya untuk bertahan menghadapi persaingan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya maupun menjadi perusahaan yang terdepan. Pembangunan ekonomi yang terjadi pada globalisasi ini tidak dapat terlepas dari perkembangan berbagai macam lembaga keuangan, salah satunya yang mempunyai peranan tersebut adalah bank.

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Kita ketahui, perbankan mempunyai pangsa pasar besar sekitar 80 persen dari keseluruhan sistem keuangan yang ada. Mengingat begitu besarnya peranan perbankan di Indonesia, maka pengambil keputusan perlu melakukan evaluasi kinerja yang memadai (Sudiyatno, 2010). Selain itu bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, yang membutuhkan dana (Ismail, 2011).

Dapat dikatakan bank merupakan perantara antara masyarakat yang menyimpan uang dan masyarakat yang meminjam uang.

Pada pertengahan 1997, telah terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak pada krisis moneter yang dimulai pada tahun 1998, dimana nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dollar Amerika Serikat menyebabkan sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar pinjaman kepada bank dan perbankan juga tidak mampu membayar kewajibannya sehingga membuat industri perbankan melakukan pembenahan, salah satu dengan melakukan merger. Pada tanggal 2 Oktober 1998 berdiri Bank Mandiri sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabungkan ke dalam Bank Mandiri.

Krisis perbankan membawa dampak yang merugikan terhadap perekonomian secara umum. Rendahnya kualitas perbankan, lemahnya kondisi internal perbankan serta kualitas manajemen bank dan pengawasan dari Bank Indonesia yang tidak efektif membuat krisis tersebut terjadi. Saat ini kesehatan bank mendapat perhatian besar bagi masyarakat karena adanya keinginan untuk mendapatkan jaminan keamanan atas uang yang disimpan di bank agar peristiwa yang sudah berlalu tidak terulang kembali.

Pada dua tahun terakhir banyak terjadi kasus korupsi di bank perkreditan rakyat. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank

perkreditan rakyat. Salah satunya kasus korupsi yang terjadi di BPR Pundi Artha Sejahtera.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman 5-7 tahun penjara bagi pemilik dan jajaran manajemen BPR Pundi Artha Sejahtera karena mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Tri Hadibudi Satrio dengan hakim anggota Diah Siti Basariah dan Ida Ayu Puspa Adi juga menyertakan denda Rp5 miliar hingga Rp10 miliar bagi keenam terdakwa. David Ayus Adhyatman yang merupakan salah satu pemegang saham BPR PT Juang Arta yang kini berganti nama menjadi BPR Pundi Artha Sejahtera, divonis 5 tahun penjara disertai denda Rp 5 miliar subsidair satu bulan kurungan. Para pemilik dan manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu diseret ke persidangan karena didakwa mencairkan uang deposito senilai Rp2,3 miliar tanpa sepengetahuan nasabah. Kasus pencurian deposito milik nasabah bernama Thomas Hosean Ciovanlee itu terjadi pada 2006. Saat BPR berganti nama, kepemimpinan manajemen dialihkan ke kerabat David. Saat itulah, David memerintahkan pencairan dana deposito milik Thomas Hosean tanpa sepengetahuan nasabah. Proses pencairan deposito itu berlangsung tiga kali dan melibatkan lima manajemen BPR, yaitu terdakwa Charles, Sihar Sidabutar, Ahmad Hendra, Donal Mooy, dan Agus Suharyatman. (*Tribunnews.com*, Jakarta, 13 Februari 2014).

Hal diatas dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menyimpan dan meminjam dana melalui BPR. Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan

sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan itu sesuai dengan fungsi bank itu sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Adapun dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan dan deposito. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani (2007) dalam Sudiyatno (2010), memperlihatkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesowo, Kuncoro dan Suharjono (2002) dalam Sudiyatno (2010).

Menurut Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau yang disebut dengan rasio BOPO. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasionalnya. Bagaimanapun jika kita berbicara tentang kinerja bank pasti berhubungan dengan efisiensi operasi yang menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua operasionalnya dengan tepat.

Pada saat ini masyarakat lebih pandai dalam memilih lembaga keuangan untuk menjaga asetnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan sebagian orang melihat laporan keuangan dari bank tersebut sebelum menanamkan aset yang dimilikinya.

Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2011:22). Laporan

keuangan berfungsi untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen perusahaan dengan pemilik atau kreditor yang berada diluar perusahaan, selain itu laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, dengan menggunakan teknik analisis yang diperlukan (Darsono dan Ashari, 2004:13). Selain laporan keuangan, ada indikator lain yang bisa mengukur kinerja suatu bank yaitu profitabilitas.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Syofyan, 2002 dalam Sudiyatno, 2010). Salah satu pengukuran kinerja perusahaan tersebut ialah *Return on assets* (ROA) yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dalam penentuan kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dan tidak memasukkan unsur *return on equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009:119). Selain itu ROA juga mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba. ROA dapat diartikan dengan dua cara, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam

mendayagunakan aset untuk memperoleh laba dan mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor (Prihadi, 2010:152).

Dewi (2014) menjelaskan bahwa selain ROA untuk menilai profitabilitas, BOPO merupakan hal yang penting untuk menilai dari aspek *earning* (profitabilitas). Semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai bank semakin meningkat. BOPO yang diteliti oleh Widati (2012) dalam Dewi (2014) tidak ada pengaruh antara BOPO terhadap ROA. Dalam penelitian Dewi (2014) menyatakan hasil penelitian Widati (2012) berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2012) yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan BOPO terhadap ROA. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Widati (2012) dalam dewi (2014) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh BOPO terhadap ROA.

Tabel 1.1 *Tabel DPK, BOPO, dan ROA Wilayah DKI Jakarta 2009-2013*

Indikator	Des-09	Des-10	Des-11	Des-12	Des-13
Jumlah BPR :	27	25	27	26	25
DPK :					
Tabungan	56.264.394	118.272.668	168.382.964	167.019.918	154.088.582
Deposito	358.314.648	460.403.735	704.361.916	906.499.847	864.966.089
Jumlah	414.579.042	578.676.403	872.744.880	1.073.519.765	1.019.054.671
BOPO	97,64%	106,43%	104,85%	101,18%	109,56%
ROA	0,68%	-0,07%	1,07%	1,34%	1,12%

*Sumber data diperoleh dari bi.go.id*

Dari tabel 1.1 terlihat jika BOPO mengalami kenaikan maka ROA mengalami penurunan, dan jika BOPO mengalami penurunan maka ROA akan mengalami kenaikan. Pada situs Bank Indonesia, dijelaskan bahwa BPR dapat dikatakan sehat dan memiliki kinerja yang baik apabila memiliki rasio ROA lebih dari 1,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPR di Provinsi DKI Jakarta belum terlalu efektif dan efisien, hal ini ditunjukkan dengan nilai ROA pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2013 masih dibawah 1,3%. Hal ini dipengaruhi oleh nilai BOPO yang sangat besar, BOPO merupakan penilaian seberapa besar pendapatan operasi digunakan untuk membiayai biaya operasi, maka nilai BOPO yang besar menunjukkan bahwa BPR di Jakarta belum dapat efisien dan efektif, hal ini berpengaruh negatif untuk ROA karena jika tidak efisien dalam menekan biaya, maka laba yang dihasilkan akan semakin sedikit.

Lalu dalam tabel diatas dapat terlihat bahwa dana pihak ketiga mengalami kenaikan maka ROA akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya jika dana pihak ketiga mengalami penurunan maka ROA mengalami penurunan. Namun pada tahun 2010 terjadi hal yang berbeda. Karena Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per November 2009, masih ada 11 bank umum yang terancam turun kelas lantaran modalnya masih di bawah ketentuan BI, minimal Rp100 miliar hingga akhir 2010.

Sementara, di BPR, menurut Ratna E. Amiaty, Direktur Kredit, BPR, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) BI, sejumlah BPR belum memenuhi ketentuan permodalan walaupun telah ada relaksasi, khususnya untuk

persyaratan modal 70%, dari akhir 2008 menjadi akhir 2009. "Berdasarkan data per November 2009 masih terdapat 90 BPR yang belum memenuhi persyaratan modal sebesar 70% dari modal disetor dan tiga BPR yang belum memenuhi 40% dari persyaratan," jelas Ratna. Sementara itu, Hiras Lumban Tobing, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya (DKI Jaya) dan sekitarnya, menyebutkan, BPR yang kesulitan memenuhi permodalan yang disyaratkan BI di DKI Jaya dan sekitarnya sebanyak 26 BPR."Per Desember 2009 kalau di DKI Jaya dan sekitarnya (Bodetabek) yang modalnya masih di bawah 40% masih ada satu BPR. Kemudian, yang di bawah 70% tinggal 25 BPR," sebut Hiras. (*Infonews.com*, Jakarta, 17 Februari 2010)

Penurunan jumlah BPR dari tabel 1.1 yang berkurang setiap tahunnya dikarenakan BPR yang dilikuidasi merupakan bank-bank bervolume kecil. Kemudian, bank-bank tersebut banyak berkurang karena melakukan merger (*Tribunnews.com*, Jakarta, 26 Februari 2013). Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan periode yang lebih baru dan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Faktor-faktor yang terkait dengan ROA dalam penelitian ini adalah BOPO dan dana pihak ketiga. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menggunakan objek penelitian yang difokuskan pada Bank Perkreditan Rakyat daerah DKI Jakarta, Dengan alasan Bank Perkreditan Rakyat daerah DKI Jakarta dikarenakan daerah ini mendapat perhatian dan pengawasan lebih dalam

industri perbankan. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang lebih baru tahun 2009 sampai dengan 2013. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan tingkat generalisasi yang lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar kinerja Bank Perkreditan Rakyat yang diukur dengan ROA selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012. Selain itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini tentang **“Pengaruh Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Perkreditan Rakyat”** dianggap penting untuk dilakukan. Rasio yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini adalah *Return On Asset*, BOPO dan Dana Pihak Ketiga.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa masalah yang dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Nilai BOPO yang besar menunjukkan bahwa BPR di jakarta belum dapat efisien dan efektif yang menyebabkan laba yang dihasilkan sedikit.
2. Jaminan keamanan atas dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang disimpan bank akan terancam jika kesehatan bank tidak baik membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank perkreditan rakyat berkurang karena terjadinya korupsi.

3. Adanya peningkatan dan penurunan pendapatan yang terjadi pada BPR di DKI Jakarta pada tahun 2009 – 2013 yang perlu di analisis.
4. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan membuat posisi bank semakin baik dari segi penggunaan aset.
5. Menurunnya tingkat kemampuan Bank dalam menutup biaya operasi dengan menggunakan pendapatan operasi, akan menunjukkan seberapa besar efisiensi operasi dilakukan dengan tepat

#### **C. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menganalisis Pengaruh BOPO dan dana pihak ketiga terhadap *Return On Asset* pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional. Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih efektif dan tepat

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti memfokuskan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah BOPO berpengaruh secara terhadap ROA pada Bank Perkreditan Rakyat konvensional di DKI Jakarta?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap ROA pada Bank Perkreditan Rakyat konvensional di DKI Jakarta?

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Memaparkan penelitian tentang pengaruh BOPO dan Dana Pihak Ketiga terhadap Bank Perkreditan Rakyat untuk menjadi *benchmark* atau pembanding mengenai pengelolaan BPR yang dapat digunakan untuk mengembangkan masing masing BPR dimasa mendatang.

### 2. Kegunaan Praktikal

Memberikan informasi tentang pengaruh BOPO dan Dana Pihak Ketiga terhadap Bank Perkreditan Rakyat agar menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga membantu untuk menentukan bank yang layak untuk dijadikan tempat investasi atau menjadi pertimbangan dalam memilih BPR untuk menunjang bisnis yang akan dilakukan.